

# **RADIKALISME DAN PLURALISME AGAMA**

## **Konflik antar Umat, Agama dan Relasi Kekuasaan Industri di Kabupaten Bekasi**

**Aden Rosadi**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

### **Abstrak**

Secara kategoris, program ini mengarah pada tiga permasalahan sosial. *Pertama*, kesadaran masyarakat mengenai arti penting pandangan hidup yang lebih toleran, terbuka dan lebih pluralis di tengah-tengah perkembangan industrialisasi. Industrialisasi yang dikembangkan di kawasan pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*), yang sebagian besar penduduknya masih memegang nilai-nilai pedesaan-agraris, telah melahirkan apa yang dinamakan proletarisasi petani. Proletarisasi ini didahului oleh proses peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi kian intens dan terintegrasi ke dalam kapitalisme industri. Hal ini berakibat terjadinya krisis identitas yang berujung pada sikap oposisi di sebagian besar masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan eksistensi agama-agama lain. *Kedua*, perubahan tersebut berdampak pada munculnya sikap radikalisme masyarakat dengan mengusung tema-tema agama. Pembangunan rumah ibadah yang sejatinya merupakan “rumah Tuhan” bagi setiap umat beragama, dianggap sebagai bahaya yang dapat mengancam eksistensi masyarakat dan penganut agama lain. Sistem nilai yang terbangun sebagai masyarakat tertindas menjadi salah satu motivator dan katalisator lahirnya radikalisme beragama di tingkat masyarakat arus bawah. *Ketiga*, kebijakan pemerintah menyangkut pembangunan kerukunan antarumat beragama. Bagian terakhir ini berhubungan dengan konsep *good governance*. Sebagai sebuah pendekatan institusional, konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diartikan sebagai interaksi antara penyelenggara negara (pemerintah) dengan kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Menurut catatan Bank Dunia, setidaknya ada empat dimensi yang penting dalam *good governance*, yakni keteladanan, kerangka hukum yang efektif, informasi yang sejalan dengan transparansi (atau akuntabilitas pemerintah) dan tersedianya tenaga kerja terdidik. Dalam konteks ini, posisi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menjadi salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan hubungan antara pemerintah, pengusaha atau investor, tokoh agama dan masyarakat sebagai tiga kelompok kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan kesadaran pluralisme dalam kehidupan beragama masyarakat.

### **Kata Kunci:**

Agama, Masyarakat, Pluralisme

## **A. Pendahuluan**

Radikalisme dan pluralisme agama merupakan dua paradigma yang saling bertolak belakang dalam kehidupan beragama, selain di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya; sebab keduanya selain disebut sebagai *opposition binner*, juga merupakan dua hal yang sulit untuk kompromikan dan dipisahkan dalam kehidupan beragama. Pada satu sisi, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif meniadakan orang lain (*the other*), *rigid*, tertutup, ekstrimisme dan tidak jarang bersifat militeristik; sedang pluralisme mengedepankan paradigma yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan dan inklusif.<sup>1</sup>

Karena itu, mendiskusikan masalah kerukunan antarumat beragama, sebagai implementasi pluralisme, berarti langsung ataupun tidak mengasumsikan adanya kemungkinan berbagai penganut agama bertemu dalam sebuah landasan bersama (*common platform*). Sebab logika kerukunan dan toleransi ialah sikap saling

---

<sup>1</sup> Paradigma kekerasan seringkali digunakan secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan yang diusung masing-masing, namun tetap memiliki makna yang sama. Bisa disebut dengan “puritanisme”, “nativisme”, “ekstrimisme”, “fanatisme”, “militanisme” dan lain sebagainya. Lihat Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN. 1998), hlm. xvi.

pengertian dan penghargaan, yang pada urutannya mengandung logika titik temu, sekalipun tentu saja hanya kepada hal-hal yang prinsipil. Hal-hal terperinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan masing-masing kelompok intern sebuah agama tertentu sendiri, memiliki idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni “hanya berlaku secara intern”. Karena itu, ikut campur seorang penganut agama dalam permasalahan rasa kesucian seseorang dari agama lain adalah tidak rasional dan *absurd*.

Pluralisme, kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebenarnya bukan barang asing bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Hidup berdampingan kelompok non-Muslim, khususnya etnis China yang mayoritas beragama Konghucu, Budha dan Hindu, telah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu; kuil-kuil kuno dan perkampungan China—seperti *Chinese town*—pun menjadi saksi sejarah betapa kehidupan beragama telah berjalan secara harmonis di daerah ini. Tradisi religius etnis Betawi-Banten yang diwariskan secara turun-temurun masih tetap dipegang, walaupun kondisi saat ini didapatkan pada kompleksitas kehidupan modern, gaya hidup dan infiltrasi negatif budaya asing, merupakan potensi sekaligus kekuatan dalam mempertahankan dan membangun spiritual kehidupan masyarakat. Tradisi keagamaan seperti pengajian rutin majelis ta’lim, ceramah agama, tahlil, shalawat dan ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah berjalan sejak lama. Bahkan saat ini, pendidikan keagamaan tradisional yang terlembagakan dalam pondok pesantren tetap eksis yang berjumlah 41 pondok pesantren, 330 kiai dan 15.768 santri.

Dengan penduduk berjumlah sekitar 2.270.900 orang, sejak beberapa tahun Kabupaten Bekasi terus mengembangkan dan mempromisikan dirinya sebagai daerah industri. Pada tahun 2001, misalnya, dengan jumlah 595 perusahaan yang bergerak di segala bidang, saat ini Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah hingga mencapai 666.580 tenaga kerja.<sup>2</sup> Sejak 1980-

---

<sup>2</sup>Lapangan usaha terdiri dari pertambangan, industri, listrik, gas, air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan komunikasi,

ankemajuan industrialisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Bekasi menjadi babak baru bagi sejarah masyarakat yang masih kuat memegang norma-norma dan tradisi masyarakat agraris. Untuk menopang dan mempercepat visi sebagai daerah industri yang religius, “Masyarakat Agamis Berbasis Agrobisnis dan Ekonomi Berkelanjutan”, saat ini Kabupaten Bekasi telah memiliki tiga kawasan raksasa industri yang umumnya tersebar di bagian selatan, EJIP (*East Jakarta Industrial Park*), Jababeka, dan Kawasan Industri Cibitung 2100. Belum lagi kawasan-kawasan kecil industri lainnya yang sebagian besar terletak di pinggiran kota. Pertumbuhan ini sudah barang tentu melahirkan gelombang lapangan kerja yang sangat besar sehingga bisa menyedot masyarakat dari seluruh Indonesia yang ingin mengadu nasib di daerah ini. Secara selintas, pertumbuhan ekonomi pun mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001 sebesar 32,28 trilyun dengan kontribusi terbesar di sektor industri sebesar 83,48%.

Seiring dengan perkembangan industrialisasi ini, gejala-gejala sosial-psikologis sebagai akibat perubahan yang sangat cepat dapat dimanipulasi dengan mudah untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini disebabkan karena gejala-gejala ini dengan sendirinya diikuti dengan perasaan kecewa, dendam, dan keinginan emosional untuk melawan “kemapanan” (*establishment*). Kemapanan di sini bisaanya dianalogikan dengan pemerintah dan kelompok elit penguasa (*ruling elite*). Namun, gejala-gejala tersebut dapat memotivasi timbulnya inisiatif dalam mencari faktor pengimbang dan kompensasi. Pencarian faktor pengimbang ini biasanya disalurkan dalam dua bentuk, baik negatif maupun positif. Contoh dari pengimbang yang negatif adalah munculnya sikap-sikap radikal yang sering dijadikan mediator untuk “mengisi” kekecewaan dan ketidakpuasan tersebut.<sup>3</sup> Bahkan dalam pandangan Morris Janowitz, dampak dari perubahan sosial tersebut adalah adanya prasangka atau *stereotype* yang cenderung destruktif dan penuh dengan stigma

---

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001*.

<sup>3</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL, 2006), jilid I hlm. 724.

mengenai kelompok atau golongan tertentu, sehingga sulit menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang positif menuju demokrasi dan pluralisme.<sup>4</sup>

Secara antropologis, masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri, sebenarnya—meminjam istilah Alvin Toffler—masyarakat Bekasi adalah masyarakat yang masih berada dalam dua gelombang (*wave*) pertama peradaban umat manusia, yakni pertanian dan industri. Secara geografis, masyarakat Bekasi bagian utara adalah bermata pencaharian sebagai petani yang jauh tertinggal pembangunannya dengan daerah selatan sebagai pusat industrialisasi. Sedangkan bagian selatan adalah daerah kawasan industri yang selama ini dianggap sebagai daerah serapan air masyarakat daerah Bekasi bagian utara.<sup>5</sup> Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan belum terbangunnya tatanan nilai sebagai masyarakat industri atau modern bagi sebagian besar masyarakat Bekasi. Artinya, pembangunan secara fisik tidak bisa diikuti dengan perkembangan pandangan dunia-nya yang masih sangat tradisional. Modernisasi atau industrialisasi yang terjadi hanya pada bangunan fisik, sedang kesadaran dan pandangan dunia (*worldview*) sebagai masyarakat tradisional yang memiliki ciri-ciri paguyuban, mistifikasi beragama, dan semangat *patron-client* yang kuat, masing dipegang sebagai kesadaran hidup.

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa kerangka pemikiran yang menarik untuk ditelaah sebagai analisis sosial terhadap permasalahan radikalisme. Prof. Dr. Usman Pelly, mantan guru besar Antropologi IKIP Medan, mengemukakan mengenai adanya tiga sumber konflik dalam masyarakat. *Pertama*, perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; *kedua*, perluasan batas-batas kelompok etnis dan sosial-budaya; serta *ketiga*, perbenturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Ketiganya lebih banyak didapati dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat majemuk yang mulai tumbuh karena perkembangan industri yang pesat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Intensitas konflik dengan faktor-faktor kemajemukan masyarakat dapat diklasifikasikan ke

---

<sup>4</sup>*Ibid.* jilid II, hlm. 800.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001.

dalam dua kategori, yakni horisontal dan vertikal. Faktor-faktor horisontal meliputi etnis/ras atau asal-usul keturunan; bahasa daerah; adat istiadat; agama; dan kehidupan sosial-politik.<sup>6</sup> Apabila kemajemukan horisontal merupakan *ascribed factors*, sedang faktor-faktor kemajemukan vertikal lebih banyak berciri *achievement factors*.

Permasalahan tersebut berujung pada kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang tertindas (*oppressed society*). Tertindas dari perkembangan globalisasi yang mewujud dalam bentuk hegemoni industri yang kurang memperhatikan aspek lokalitas masyarakat dan lebih mementingkan etnis dan agama tertentu. Nampaknya *prejudice* atau kecurigaan masyarakat pada industrialisasi memuncak ketika Pengelola Kawasan Jababeka membangun rumah ibadah bagi umat Kristiani, pembangunan gereja di beberapa kompleks perumahan elit seperti Lippocity Cikarang, perumahan Legenda di Tambun Utara. Sebaliknya, di sejumlah perumahan yang mayoritas penduduknya adalah Non-Muslim, maka pembangunan masjid dan musholla pun mendapatkan perlawanan yang sama. Dalam konteks ini, nampaknya cukup relevan ketika Kuntowijoyo mengatakan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor industri atau nonpertanian itulah yang apabila persoalan, seperti pengangguran atau penghinaan, mudah menjadi agresif emosional, punya *collective behavior* tanpa harus digerakkan pihak ketiga atau dikipasi.<sup>7</sup>

Bentuk gagasan yang terdapat dalam konsep radikalisme ini bisa diterapkan untuk melihat gejala radikalisme sosial yang berkembang di daerah Kabupaten Bekasi lima tahun terakhir. Sebagai *weltanschauung* atau pandangan dunia (*worldview*) sekaligus pengalaman hidup (*lebenswelt*), radikalisme agama yang muncul dalam bentuk penolakan pembangunan rumah ibadah, nampaknya merupakan imbas dari pembangunanisme (*developmentalism*) atau modernisasi yang belum selesai di Negara-negara miskin. Faktor marjinalisasi penduduk asli (baca: umat Islam) dalam merespon dan lemahnya pemerintah daerah dan investor asing maupun domestik yang kurang memaksimalkan perhatiannya pada *community development*, adalah faktor-

---

<sup>6</sup> Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo-P3M. 2000), hlm. 71.

<sup>7</sup> Mulyana, W. Kusuma, *Analisis Sosial*. hlm. 69.

faktor yang menimbulkan maraknya sikap radikalisme beragama di daerah industri ini.

## B. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai fenomena radikalisme agama bukan merupakan wacana baru bagi sebagian besar masyarakat. Berbagai karya telah lahir hanya sekedar untuk membahas permasalahan ini, baik melalui buku, jurnal, majalah dan surat kabar. Karya Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo yang berjudul *Radikalisme Agama* (2004), memberikan gambaran mengenai fenomena kekerasan berbau sosial-keagamaan yang dibentuk oleh kepentingan nasional dan internasionalisasi. Globalisasi ternyata memberikan dampak negatif melalui internalisasi nilai-nilai kekerasan dan perang ideologi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karenanya dalam buku ini, kekerasan dianggap sebagai fenomena yang berskala global maupun regional.

Dalam konteks yang sama, Sudirman Tebba dalam karyanya *Islam Pasca Orde Baru* menggambarkan radikalisme agama dan runtuhnya nilai-nilai pluralisme di era reformasi sebagai permasalahan keberagaman yang sangat kompleks pasca orde baru. Kerusuhan yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) pasca orde baru banyak dilandasi oleh beberapa faktor yang berbeda dengan menarik agama ke dalam konflik tersebut. Sebut saja karena kepentingan ekonomi dan politik baik pada tingkat elit maupun massa. Misalkan etnis Madura di Kalimantan yang telah hidup turun temurun di daerah-daerah tersebut. Mereka menguasai sektor perdagangan. Keadaan itu mengurangi peluang usaha penduduk asli di daerah tersebut. Karenanya usaha yang dikembangkan masyarakat penduduk asli adalah dengan cara mengusir mereka dari daerah itu. Inilah kemudian yang memicu konflik sosial.<sup>8</sup> Faktor lain adalah perebutan jabatan pemerintahan didorong oleh pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) yang memberi wewenang kepada tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Akibatnya kelompok-

---

<sup>8</sup>Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001), hlm. 138.

kelompok sosial yang berbeda kepentingan berusaha merebut wewenang yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Nampaknya Komaruddin Hidayat lebih melihat gejala radikalisme agama lebih bersifat psikologis-sosiologis akibat politik dan agama tidak berjalan secara semestinya. Perasaan merasa “tersisih”, “tertindas”, tidak diperhitungkan secara politis bahkan dianggap sebagai “beban” atau “pengacau” pembangunan merupakan sumber konflik utama yang berujung pada sikap radikalisme agama.<sup>10</sup> Ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan mereka seringkali muncul ke kesadaran. Aspirasi yang sama tersebut kemudian berubah menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok. Hasilnya dapat disebut sebagai sebuah *struggle group* atau kelompok pejuang.<sup>11</sup>

Dahrendorf menyebutkan tiga kondisi yang mendukung kemunculan *struggle group* dan seringkali menjadi pendorong terjadinya konflik, yakni (1) komunikasi terus-menerus di antara orang-orang senasib; (2) adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok; dan (3) legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas—atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.<sup>12</sup>

Namun pembahasan mengenai radikalisme agama dalam konteks yang lebih spesifik nampaknya masih kurang. Apalagi radikalisme agama sebagai dampak dari permasalahan ekonomi yang berimbas pada penolakan pembangunan rumah ibadah agama di daerah tertentu, hampir bisa dikatakan belum ada. Untuk itu, hampir dikatakan bahwa penelitian mengenai permasalahan radikalisme dan pluralisme agama di Kabupaten Bekasi ini hanya memiliki beberapa rujukan pustaka yang bersifat teoritis dan umum. Karena itu, untuk

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 139.

<sup>10</sup>Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta: Paramadina. 1998), hlm. 184.

<sup>11</sup>Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 34.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 75.

mendukung sumber rujukan, peneliti mencoba mengambil dan mengolah dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

### C. Perumusan Masalah

Hans Kűng pernah mengatakan bahwa agama yang benar tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebab agama selalu mempertahankan dan menghormatinya.<sup>13</sup> Asumsi demikian benar apabila melihat pesan transendental agama yang membawa pesan profetik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanity/insāniyyat*), seperti keadilan (*‘adl/justice*), persamaan hak dan kedudukan di depan hukum (*equality/musāwah*), pembebasan (*freedom/hurriyyah*), perdamaian (*salām/peace*) dan hidup saling menghormati satu sama lain (*tasammuh*). Bahkan ajaran untuk menghormati perbedaan etnis dan agama orang lain sebagai fitrah bagi kita manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di muka bumi terungkap dalam salah satu firman-Nya (Qs. Al-Mā’idah [5] 48). Inilah yang disebut potensi integratif agama apabila telah menjadi *weltanschauung*, bisa berpartisipasi dalam proses perubahan masyarakat lewat industrialisasi. Namun apabila dimensi imanensi atau historisnya, agama ternyata juga memiliki potensi disintegratif selain bidang politik, ekonomi dan orientasi kesukuan. Tidak sedikit dimensi ini menjadi sejarah kelam semua agama—Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Malahan kondisi inilah yang sedang terjadi di hampir setiap agama, termasuk umat Islam Indonesia pada umumnya dan Bekasi pada khususnya.

Secara filosofis, fenomena radikalisme dan pluralisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti (*core experience*), memori kolektif (*collective memory*) dan penafsiran (*interpretation*) agama.<sup>14</sup> Kemajemukan dalam hidup, etnis, suku dan agama adalah prinsip sunnatullah yang bersifat primordial yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun, aktif ataupun pasif. Keberadaannya me-

<sup>13</sup>*Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei. 1993), hlm. xvii-xviii.

<sup>14</sup> J.B. Banawiratma, SJ., “Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik”, dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian Interfidei. 1993), hlm. 17.

rupakan pengalaman inti semua agama yang mengajarkan adanya orang lain dalam hidup ini. Namun pengalaman inti yang bersifat primordial-ilahi ini hidup dalam ruang sejarah yang membentuk pengalaman hidup atau memori kolektif dalam kehidupan beragama. Secara psikologis, memori kolektif beragama ini berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya, bisa positif ataupun juga negatif. Kedua-duanya memiliki implikasi yang sangat berbeda dalam melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agamanya. Komunitas agama yang sedang berada di puncak kejayaan akan berbeda dengan komunitas agama yang berada dalam posisi termarginalkan dalam menafsirkan kandungan yang terdapat dalam agamanya. Untuk itu, radikalisme dan toleransi dalam hidup beragama bisa mengambil berbagai macam bentuk, orientasi dan tujuan seperti politik, ekonomi, sosial dan bahkan budaya.

Kasus radikalisme dan pluralisme agama yang terjadi di Kabupaten Bekasi merupakan gambaran mengenai agama sebagai pengalaman inti (*core-experience*) yang semestinya menjadi *weltanschauung* dan bisa menjadi perekat masyarakat yang sedang mengalami revolusi industri. Namun ketertindasan secara ekonomi dan politik yang menimpa sebagian besar komunitas pribumi yang *notabene* adalah mayoritas Muslim, pengalaman inti ini pun digantikan dengan memori kolektif dan penafsiran agama yang cenderung menampikan radikalisme. Dengan demikian, tidak heran jika komunitas Muslim ini seringkali disebut-sebut sebagai penghambat dan *trouble maker* bagi pemerintah dan pemilik modal dalam melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penanganan mengenai radikalisme dan pluralisme yang terwujud dalam penentangan pembangunan rumah ibadah ini, diarahkan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan *civil society*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini diharapkan mampu:

1. Mengungkap proses terjadinya radikalisme beragama, menelusuri aktor-aktor yang terkait serta relasi kepentingannya, dan mengungkap dampak sosial dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Memberikan informasi dan data yang obyektif

ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah mengenai permasalahan radikalisme agama yang mewujud dalam bentuk penolakan pembangunan rumah ibadah di sejumlah daerah di Kabupaten Bekasi.

2. Membongkar dan mengungkap tabir yang sebenarnya menjadi permasalahan utama (*main problem*) yang berkembang di masyarakat industri Kabupaten Bekasi.
3. Mendorong simpul-simpul masyarakat untuk terlibat dalam proses membangun kesadaran bersama mengenai arti pentingnya hidup berdampingan antarsesama pemeluk agama yang berbeda.

Adapun manfaat program adalah:

1. Terungkapnya relasi radikalisme beragama dalam konteks perubahan masyarakat industri dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi serta faktor-faktor dan aktor-aktor kelompok kepentingan yang bermain di dalamnya. Selain itu, penelitian ini memberikan data dan informasi yang obyektif, ilmiah dan valid menyangkut radikalisme dan kehidupan toleransi antarumat beragama di daerah Kabupaten Bekasi.
2. Terbongkarnya struktur dan ideologi radikalisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
3. Tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat, agamawan dan pemerintah mengenai substansi permasalahan yang sebenarnya melatarbelakangi munculnya penolakan pembangunan rumah ibadah yang berbentuk pada radikalisme agama.

## E. Kerangka Teoritik

Industrialisasi diberi definisi sebagai proses perkembangan teknologi melalui penggunaan ilmu pengetahuan terapan. Hal tersebut ditandai dengan ekspansi produksi besar-besaran melalui penggunaan tenaga permesinan, daerah pemasaran yang luas bagi barang-barang produsen maupun konsumen, angkatan kerja yang terspesialisasikan dengan pembagian kerja, dan urbanisasi yang meningkat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi*.hlm. 1080.

Menyertai perubahan di bidang ekonomi adalah perubahan yang kompleks dalam kelompok dan proses sosial. Tahap pertama yang tipikal dalam proses industrialisasi, berdampingan dengan urbanisasi, adalah meningkatnya mobilitas penduduk, di samping adanya perubahan yang penting dalam adat kebiasaan dan moral masyarakat. Namun yang sangat menonjol adalah pengaruh-pengaruh terhadap status pekerjaan dan keahlian-keahlian penduduk kerja, kehidupan keluarga dan kedudukan wanita, tradisi serta kebiasaan-kebiasaan dalam mengonsumsi barang. Konflik antarkelas, ras, agama dan kelompok sosial lainnya juga dilihat sebagai akibat penyerta yang tipikal.

Dengan demikian, industrialisasi menyangkut perubahan sosial, yakni perubahan susunan kemasyarakatan dari sistem sosial pra-industri (agraris) ke sistem sosial industrial. Kadang-kadang hal ini juga disejajarkan dengan perubahan dari masyarakat pramodern ke masyarakat modern. Atau, dalam istilah yang sering digunakan saat ini, perubahan dari “negara kurang maju” (*less developed country*) ke keadaan masyarakat “Negara yang lebih maju” (*more developed country*). Untuk itu, para ahli ilmu sosial membedakan hubungan-hubungan “natural dan organis” keluarga, desa, dan kota kecil (*gemeinschaft*) dengan kondisi yang “artifisial” dan “terisolasi” dari kehidupan kota dan masyarakat industri (*gesellschaft*), ketika hubungan-hubungan asli dan natural manusia satu sama lainnya telah dikesampingkan, dan setiap orang berjuang untuk keuntungannya sendiri dalam semangat kompetisi. Menurut Bahtiar Effendi, pertemuan (*encounters*) masyarakat agama dengan realitas empiris tidak selalu mengambil bentuk wacana dialogis yang konstruktif. Alih-alih, yang muncul adalah mitos-mitos ketakutan yang membentuk kesan bahwa perubahan sosial yang cepat itu dengan serta-merta menyebabkan agama berada pada posisi “bawah” (*subordinate*) atau “pinggir”. Suatu pengalaman masyarakat Eropa Barat, yang dalam pandangan Ernest Gellner, “pertemuan” mereka dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial dan industrialisasi mengantarkan mereka pada pintu “sekularisasi”. Dengan itu, nilai-nilai agama dikhawatirkan memudar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bahtiar Effendi, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan. 2000), hlm. 16.

Bahkan sampai pada tingkat tertentu, masyarakat agama dewasa ini dihadapkan pada situasi kegamangan dalam menghadapi proses globalisasi. Kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi dapat (a) meminggirkan nilai-nilai agama; (b) menghancurkan ikatan unit-unit sosial masyarakat; dan (c) pada akhirnya memisahkan agama dari dasar-dasar organisasinya.<sup>17</sup> Inilah sistem nilai kompensasi masyarakat yang negatif yang melahirkan sikap radikalisme beragama di kalangan masyarakat bawah.

Istilah “radikalisme” sebenarnya bukan konsep asing dalam ilmu sosial. Disiplin politik, sosiologi, dan sejarah sejak lama telah menggunakan terma ini untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu. Sejarawan Kartono Kartodirjo, misalnya, menggunakan istilah ini untuk menggambarkan gerakan protes petani yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Kata “radikal” digunakan sebagai indicator sikap penolakan total terhadap kondisi yang sedang berlangsung.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, Adeed Dawisha menggambarkan radikalisme sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan—dan bisaanya dengan cara-cara kekerasan—dan menggantinya dengan sistem baru.<sup>19</sup>

Mengadopsi temuan Horace M. Kallen, radikalisme sosial sedikitnya memiliki tiga ciri *mainstream* dalam melakukan gerakannya. *Pertama*, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Bisaanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kondisi yang ditolak. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 21.

<sup>18</sup>Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN. 1998), hlm. xvi.

<sup>19</sup> Menurut Adeed Davisha, ada perbedaan esensial antara “terorisme” dengan “radikalisme”. Kalau “terorisme” hanya merupakan salah satu di antara berbagai instrument kebijakan para pelakunya, sedang “radikalisme” adalah esensi dari kebijaksanaan itu sendiri; radikalisme juga mencakup nilai-nilai, tujuan dan *concern* dari orang-orang yang merumuskan kebijaksanaan tersebut. Lihat Dr. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina. 1996), hlm. 147.

terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung program atau pandangan dunia tersendiri. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata “*radical*”, sikap radikal mengandung keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. *Ketiga*, ciri yang terakhir ialah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafikan kebenaran sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti “kerakyatan” atau “kemanusiaan”.<sup>20</sup> Pada kondisi demikian, dialektika kekerasan dan anti-kekerasan mengalami guncangan luar biasa. Ketegangan antara tesis dan antitesis dalam dialektika tersebut mencapai puncaknya.

Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme hingga kini belum ada kesepakatan mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikal.<sup>21</sup> Oliver Roy dalam bukunya *The Failure of Political Islam* (1994) menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam sebagai Islam Fundamental, yang ditunjukkan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jami’ati Islami dan Islamic Salvation Front (FIS).<sup>22</sup> John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. xviii. Dalam konteks ini, menurut Hassan Hanafi, kekerasan terjadi di lingkungan tertentu ketika ia menjadi satu-satunya jalan dan media untuk mengekspresikan eksistensi kemanusiaan. Kekerasan dimulai dari situasi yang terbentuk oleh tiga elemen. *Pertama*, perasaan mendalam dari individu, kelompok dan bangsa akan ketidakadilan dan keputusasaan; *kedua*, ketidakberdayaan individu, kelompok dan masyarakat dalam mengubah ketidakadilan tersebut melalui segala cara tanpa kekerasan; *ketiga*, tidak adanya dialog antara pelaku ketidakadilan dan korbannya, atau mungkin ada namun sekedar dialog semu (bisu). Lihat Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib (Yogyakarta: Jendela. 2001), hlm. 54.

<sup>21</sup> Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme (*ushūliyyūn*), “kaum Islamis” (*islāmīyyūn*), “kaum otentik atau asli” (*ashliyyūn*), “pengikut para sahabat utama (*salafīyyūn*), “militant” atau bahkan “neofundamentalisme”, karena memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyempurnai ciri-ciri dalam radikalisme. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*. hlm. 109.

<sup>22</sup> Oliver Roy. *The Failure of Political Islam* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd. 1994), hlm. 2-4.

aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.<sup>23</sup> Sementara itu, Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan istilah ekstremisme Islam. Kelompok Islam ekstrem biasanya mengarahkan permusuhan dan perlawanannya kepada gerakan-gerakan Islam “tengah” atau “moderat”. Karena itu, Al-Jabiri menyebutkan bahwa musuh sejati Islam ekstrem adalah Islam moderat. Al-Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam ekstrem di masa kontemporer ini. Gerakan-gerakan ekstremis masa lalu mempraktikkan ekstremisme pada tatanan akidah, sedangkan gerakan-gerakan ekstrem kontemporer menjalankannya pada tataran syariah dengan melawan mazhab-mazhab moderat.<sup>24</sup>

Untuk lebih memperjelas fenomena radikalisme agama, kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty, dengan beberapa modifikasi, agaknya cukup relevan diterapkan untuk melihat gejala “kekerasan atas nama agama”. Menurutny, ciri yang utama adalah *oppositionalism* (paham perlawanan), yakni paham perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, apakah dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya.<sup>25</sup> Sikap melawan atau berjuang (*fight*) dilakukan, di antaranya dengan melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup; berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial; berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun konstruksi yang baru; berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?*(Oxford: Oxford University Press. 1992), hlm. 7-8.

<sup>24</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. (Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2001), hlm. 139-149.

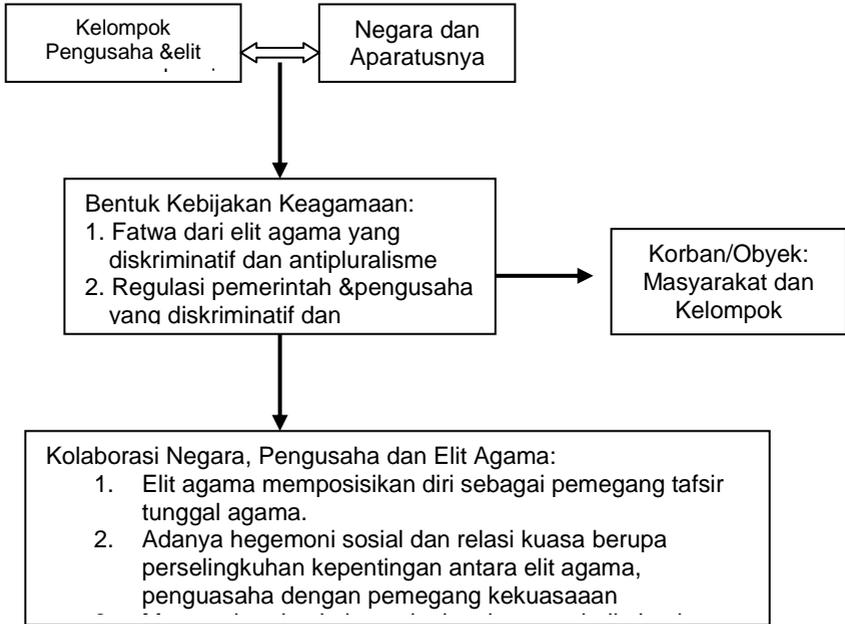
<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*. hlm. 109.

<sup>26</sup> Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*.hlm. xix.

Dalam hal ini, ormas-ormas Islam yang menentang pembangunan sejumlah rumah ibadah umat Kristiani di sebagian besar daerah Kabupaten Bekasi, seperti Pelajar Islam (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Front Pembela Islam (FPI), Front Hizbullah, Forum Komunikasi Antar Masjid Indonesia (FORKAMI) dan Ikatan-ikatan remaja masjid yang ada di seluruh Kabupaten Bekasi, memiliki ciri-ciri yang dikemukakan Marty. *Pertama*, melawan ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, seperti industrialisasi yang dianggap memiliki misi tersembunyi (*hidden agenda*) melaksanakan program kristenisasi. *Kedua*, melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam keberadaan atau identitas yang menjadi tatanan hidup, dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan rumah ibadah dan kalangan investor asing. Hal ini terkait dengan adanya dugaan rekayasa politik dari partai politik besar tertentu dan aparat keamanan; bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur tentang persyaratan pembangunan rumah ibadah sekurang-kurangnya memiliki kepala keluarga (KK) sebanyak 75 KK.; adanya pelanggaran izin membangun bangunan (IMB). *Ketiga*, berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial melalui pelembagaan kembali organisasi kemasyarakatan “paramiliter”, seperti Ikatan Poetra Daerah (IKAPOED) dan Persatuan Orang Betawi (POB), sebagai “gerombolan preman” yang berfungsi sebagai kelompok penekan. *Keempat*, berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang berasal dari warisan masa lalu maupun kontruksi yang baru. *Kelima*, berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang. Perlawanan ini dilakukan kepada kelompok-kelompok yang lebih moderat dalam melihat dan mencermati permasalahan ini. Dan *keenam*, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan. Dengan semangat yang kurang didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang Islam sebagai sebuah ajaran yang *kaffah*, mereka seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dengan mengatasnamakan untuk menjaga dan memurnikan Islam dari

segala bentuk penyimpangan di kalangan umat Islam itu sendiri dan serangan dari agama lain.

Gambar 1



## F. Metodologi

Untuk mengungkap permasalahan tersebut, penelitian ini lebih cenderung menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih selain sebagai upaya mengungkap fenomena kekerasan beragama yang berdampak pada kehidupan sosial-kemasyarakatan, juga karena agama merupakan masalah yang lebih bersifat interpretatif. Karena itu, pengumpulan data diperlukan, baik data primer maupun data sekunder di lapangan.

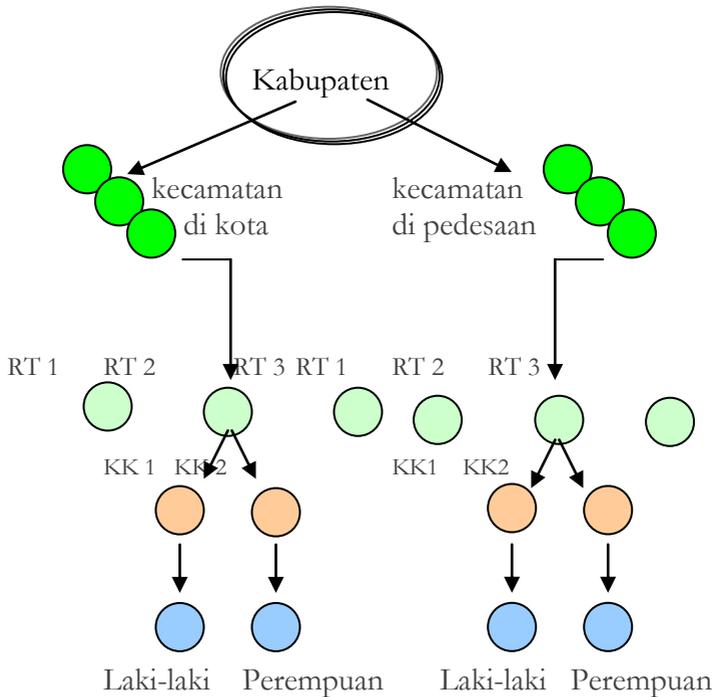
Data primer terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh para intelektual Muslim dan laporan-laporan jurnalistik (media massa) yang diterbitkan mengenai pola-pola radikalisme agama di kalangan masyarakat daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan data sekunder meliputi wawancara terstruktur dan penyebaran angket mengenai

relasi antara radikalisme agama, kebijakan pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Dalam pengambilan sampel untuk amgket ini, peneliti akan menggunakan teknik *multistage random sampling*. Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi Kabupaten Bekasi distrata atas dasar populasi di masing-masing kecamatan di seluruh Kabupaten Bekasi sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing kecamatan. Semua kecamatan di Kabupaten Bekasi akan terjaring dalam angket ini. Strata kedua adalah pembagian atas dasar wilayah tinggal: pedesaan atau kota, yang proporsinya antara 60% (kota) berbanding 40% (desa). Di samping itu, strata juga dilakukan atas dasar proporsi populasi menurut perbedaan gender: 50% laki-laki, dan 50% perempuan.

Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan atau yang setara sebagai *primary sampling unit* (PSU), dan karena itu random sistematis dilakukan terhadap desa/kelurahan di masing-masing kecamatan sesuai dengan tingkat konflik yang ada. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT), dan kemudian dipilih sebanyak 5 RT secara random. Di masing-masing RT terpilih kemudian dipilih 2 keluarga secara random. Di 2 keluarga terpilih, didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang berumur antara 17-60 tahun. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama harus laki-laki yang didaftar.

Proses Pengambilan Sampel bisa digambarkan sebagai berikut:



Data utama penelitian ini bersumber dari hasil wawancara terstruktur dengan menggunakan indikator-indikator, seperti (a) kebijakan pemerintah menyangkut pengembangan nilai-nilai pluralisme dan kerukunan antarumat beragama; (b) peran para pengusaha dalam mengembangkan industrialisasi yang berbasis pada nilai-nilai pluralis; (c) gerakan radikalisme agama yang meliputi sejarah kemunculannya, pola dan agenda perjuangan dan respons terhadap rezim penguasa dan pengusaha. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kepala daerah, lembaga atau asosiasi pengusaha, tokoh agama Islam dan Kristen, pimpinan ormas Islam dan masyarakat.

Setelah data terkumpul, maka proses penafsiran dilakukan dengan menggunakan model penafsiran fenomenologi-historis, yakni menafsirkan data secara apa adanya dalam konteks perkembangan

masyarakat tanpa berusaha mereduksi atau menjustifikasi subyektivitas peneliti. Karena itu, untuk mendukung dan memperoleh data yang diharapkan, pendekatan kualitatif yang digunakan adalah paradigma pluralis-dialogis, yakni pendekatan yang menganggap dialog sebagai suatu yang penting dalam pluralisme, bahkan suatu keharusan. Pendekatan ini menghargai dan menempatkan orang lain dari perspektif pribadi, dan menempatkan dirinya dalam kehadiran orang lain. Karenanya, mendekati hubungan antarumat beragama secara dialogis berarti mendekatinya dari bawah, yakni dari agama sebagai gejala sosial sebagai umat beragama.<sup>27</sup> Dialog otentik ini dilukiskan sangat jelas oleh filosof Jacques Maritain, “*The Culmination of knowledge is not conceptual but experiential man/woman ‘feel’ God*”. Analisis terhadap realitas, pemaparan segalanya sesuai dengan fakta yang ada, penghayatan akan dinamika yang berjalan, menggali secara mendalam jiwa umat, berbagai pengalaman mereka dan menelusuri motivasi mereka secara netral tanpa kepentingan kekuasaan, semua hal ini akan sangat membantu memahami fenomena kekerasan dalam dunia Muslim kontemporer.<sup>28</sup>

## G. Kesimpulan

Sebagai daerah yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan, Kabupaten Bekasi telah menjalankan nuansaagamis bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tidak koruptif dalam merancang dan mengimplementasikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pembangunan sarana publik. Penekanan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek pembangunan tampak jelas dalam 7 (tujuh) misi Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah “Meningkatkan Peran Serta Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan Di Segala Bidang”.

Hal ini terlihat dari jumlah penduduk muslim di Kabupaten Bekasi Tahun 2009 yang berjumlah 1.949.913 jiwa dari total jumlah penduduk 2,6 juta. Dengan jumlah 7 (tujuh) kawasan raksasa industri, Kabupaten Bekasi adalah daerah penyangga ibukota negara yang

---

<sup>27</sup>Ada tiga paradigma dalam melakukan kajian tentang pluralisme, yakni paradigma eksklusif, inklusif dan paradigma pluralis indiferen. Untuk lebih jelasnya, lihat J.B. Banawiratma, SJ., *Bersama Saudara-Saudari*.hlm. 14-15.

<sup>28</sup> Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan*.hlm. 2.

sedang mengalami perubahan yang pesat dari pola kehidupan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Bahkan perubahan ini pun menjadikan daerah tersebut sebagai wadah peleburan (*melting pot*) berbagai etnis ras dan agama. Secara kultur keagamaan, realitas keagamaan masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan. Tradisi keagamaan seperti pengajian rutin majelis ta'lim, ceramah agama, tahlil, shalawat dan ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah berjalan sejak lama. Bahkan saat ini, pendidikan keagamaan tradisional yang terlembagakan dalam pondok pesantren tetap eksis dengan jumlah 39 pondok pesantren, dan peningkatan sarana aktualisasi umat Islam selama dua tahun terakhir, jumlah masjid mengalami peningkatan sebesar 9,9%, jumlah majelis ta'lim meningkat 9,7%, dan jumlah jamaah haji meningkat sebesar 62%.

Dalam kehidupan beragama, Kabupaten Bekasi dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang religius. Sarana ibadah di Kabupaten Bekasi terdiri dari masjid 1.136, mushola 348, langgar 2.216, gereja 16, pure 3, dan vihara 2 (terdapat di Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia dan Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah); sedangkan vihara terdapat 3 buah vihara (Desa Babelan Kota Kec. Babelan, Desa Karangasih Kec. Cikarang Utara dan Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin).

Secara kuantitatif, umat Islam di Kabupaten Bekasi memang mengalami peningkatan sarana ibadah. Bahkan jumlah jamaah haji asal Kabupaten Bekasi pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut H. Soleh Djaelani, S. Ag., (Sekretaris Umum NU Kabupaten Bekasi dan Ketua Umum Pemuda Anshor Bekasi), peningkatan kuantitas sarana ibadah dan jamaah haji tampaknya kurang dibarengi dengan peningkatan kualitas pemahaman keagamaan. Bahkan tak jarang, peningkatan sarana ibadah dan jamaah haji ini pun cenderung melestarikan "menjauhnya" nilai-nilai Islam. Artinya ajaran Islam *rahmatan lil 'alamîn* belum terejawentahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks yang sama, kondisi ini pun tak jauh dengan pemahaman tentang pluralisme atau kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan angket yang disebar ke sejumlah daerah di masyarakat (perkotaan 60 orang) dan (pedesaan 40 orang), hampir 82%

mengetahui tentang maksud dengan tujuan dari kerukunan antar umat beragama. Sedangkan 20% tidak mengetahui.

Dalam pandangan KH. Imam Mulyana Al-Budry, masyarakat Kabupaten Bekasi adalah masyarakat yang sangat toleran dalam beragama. Sejak dahulu, masyarakat telah diajarkan dan hidup berdampingan dengan kalangan non-Muslim, khususnya umat Budha dan Hindu. Menurutnya, toleransi hanya bisa berjalan jika:

1. Antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya saling menghormati dan menghargai
2. Menghormati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembangunan sarana Ibadah

Namun ironisnya, kalangan industri tampaknya kurang berperan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Dana Tanggung Jawab Perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/CSR*) belum berjalan secara optimal dalam membangun pemberdayaan masyarakat, apalagi membangun kebersamaan dengan lingkungan sekitar. Padahal sebagai diamanatkan UU, perusahaan atau kawasan perumahan elit harus bertanggungjawab terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini terungkap bahwa hampir 80,36% tidak tahu keberadaan CSR, 8,34% pernah merasakan manfaat CSR dalam bentuk pembangunan infrastruktur sekolah, dan 0,99% tidak pernah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2001. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001.
- Effendi, Bahtiar dan Prasetyo, Hendro dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.). 1998. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berbenti Berpolitik?*. Bandung: Mizan.

- Esposito, John L. 1992. *The Islamic Threat Myth or Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- Hanafi, Hassan. *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib. Yogyakarta: Jendela.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- J.B. Banawiratma, S.J. 1993. "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian Interfidei.
- Kusuma, Mulyana, W. "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.). 2000. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo-P3M.
- Munawar-Rachman, Budhy. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*. Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL.
- Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roy, Oliver. 1994. *The Failure of Political Islam*. London: I.B. Tauris & Co. Ltd.
- Tebba, Sudirman. 2001. *Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana.